



**PENGARUH PDRB, INFLASI, DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIK DI JAWA
TIMUR TAHUN 2012-2018**

SKRIPSI

Oleh :

Fayd Rahmatullah

NIM 140810101158

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PENGARUH PDRB, INFLASI, DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIK DI JAWA
TIMUR TAHUN 2012-2018**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Fayd Rahmatullah

NIM 140810101158

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Ahmad Ansori dan Ibunda Faiq Rovidah, yang dengan tulus mendidik, mendoakan, memperjuangkan, serta mencurahkan, kasih sayangnya yang tak terhingga kepada ananda sehingga ananda senantiasa bersemangat dalam mengejar cita-cita dan menatap masa depan dengan optimis.
2. Adikku Muvan Nawal yang telah memberikan kasih dan sayang yang tulus kepada saya untuk terus semangat meraih keberhasilan dan kesuksesan.
3. Guru-guru dan tenaga pengajar sejak TK, Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu, keterampilan, bimbingan, serta doa yang diberikan
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalanmu berujung, buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”

-Ralph Waldo Emerson-

“ ...Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia...”

(H.R. Thabrani dalam Al-Ausath)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

-QS Al Baqarah 216-

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fayd Rahmatullah

NIM : 140810101158

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2012-2018” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika ada pengutipan dan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 November 2020

Yang menyatakan,

Fayd Rahmatullah
NIM 140810101158

SKRIPSI

**PENGARUH PDRB, INFLASI, DAN ANGKATAN KERJA
TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIK DI JAWA
TIMUR TAHUN 2012-2018**

Oleh :

Fayd Rahmatullah

NIM 140810101158

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Moh. Adenan, M.M

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh PDRB, Inflasi, Dan Angkatan Kerja Terhadap
Pengangguran Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2012-2018
Nama : Fayd Rahmatullah
Nim : 140810101158
Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 18 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP.196306141990021001

Dr. Moh. Adenan, M.M.
NIP.196610311992031001

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Riniati, M.P.
NIP. 196004301986032001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PDRB, INFLASI, DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP
PENGANGGURAN TERDIDIK DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2018**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fayd Rahmatullah
NIM : 140810101158
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal 18 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Sunlip Wibisono, M. Kes.
NIP. 195812061986031003 (.....)
2. Sekertatis : Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si
NIP. 197409132001122001 (.....)
3. Anggota : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.
NIP. 198103302005011003 (.....)



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak,CA
NIP. 197107271995121001

*Pengaruh PDRB, Inflasi, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik
Di Jawa Timur Tahun 2012-2018*

Fayd Rahmatullah

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* yaitu pengaruh PDRB, Inflasi, Angkatan Kerja terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2012-2018. Data yang dipakai menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui situs resmi BPS. Metode analisis regresi data panel menggunakan uji hipotesis secara simultan (uji F), parsial (uji t), koefisien determinan (uji R^2) pada *level significance* 5%. Hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) dapat diketahui bahwa PDRB, Inflasi dan Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan pada Pengangguran Terdidik dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif yang signifikan pada Pengangguran terdidik, dengan nilai signifikansi sebesar 0,0001. Inflasi berpengaruh negatif signifikan pada Pengangguran Terdidik dengan nilai signifikansi sebesar 0,0322. Sedangkan Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan pada Pengangguran Terdidik dengan nilai signifikansi sebesar 0,6672. Hasil perhitungan nilai statistik dapat diketahui bahwa PDRB, Inflasi dan Angkatan Kerja dalam menjelaskan Pengangguran Terdidik adalah sebesar 63%, sedangkan sisanya sebesar 27% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Kata Kunci: PDRB, Inflasi, Angkatan Kerja, Pengangguran Terdidik

*The Influence of PDRB, Inflation, and Labor Force on Uneducated
Unemployment in East Java 2012-2018*

Fayd Rahmatullah

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the independent variable has on the dependent variable, namely the effect of PRDB, inflation, labor force on educated unemployment in East Java in 2012-2018. The data used is secondary data obtained through the official BPS website. The method of panel data regression analysis used simultaneous hypothesis testing (F test), partial (t test), determinant coefficient (R2 test) at a significance level of 5%. The results of simultaneous hypothesis testing (F test) show that PDRB, inflation and employees simultaneously have a significant effect on educated unemployment with a significance value of 0.000 less than 0.05. The results of the partial hypothesis test (t test) show that the PDRB has a significant negative effect on educated unemployment, with a significance value of 0.000. Inflation has a significant negative effect on educated unemployment with a significance value of 0.0001. Meanwhile, the labor force has no significant effect on educated unemployment with a significance value of 0,6672. The results of the calculation of the statistical value show that the PDRB, Inflation and the Labor Force in explaining Educated Unemployment is 63%, while the remaining 27% is explained by other factors.

Keywords : *PDRB, Inflation, Employment Aggregates, Educated Unemployment*

RINGKASAN

Pengaruh PDRB, Inflasi, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2012-2018; Fayd Rahmatullah; 140810101158; 2020; xxx halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Jember.

Besarnya jumlah penduduk di Indonesia jika tidak dimanajementi dengan baik, akan berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin membanjir. Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 yang memberikan keleluasaan tenaga kerja asing masuk ke Negara Indonesia akan memperkeruh persaingan di dunia persaingan kerja. Jumlah pengangguran di Jawa Timur mengalami perubahan setiap tahunnya, namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi menarik untuk didalami lebih lanjut faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Timur tahun 2012-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh PDRB, Inflasi, Angkatan Kerja terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2012-2018. . Data yang dipakai menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui situs resmi BPS. Metode analisis regresi data panel menggunakan uji hipotesis secara simultan (uji F), parsial (uji t), koefisien determinan (uji R_2) pada level significance 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pengangguran Terdidik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar PDRB ternyata membuat jumlah pengangguran terdidik semakin menurun. PDRB yang tinggi bisa mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menggarap beragam sektor, PDRB yang tinggi dapat menjadi indikasi perdagangan makin aktif sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja (Sukmaraga, 2011). 2) Inflasi memiliki pengaruh negatif yang

signifikan terhadap Pengangguran Terdidik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai Inflasi, maka jumlah pengangguran terdidik akan semakin berkurang. Hal ini dapat disebabkan karena Inflasi mencerminkan naiknya permintaan agregat yang akan berdampak terhadap kenaikan harga. Semakin tinggi harga (inflasi) maka akan mendorong produsen untuk memenuhi permintaan tersebut agar meningkatkan kapasitas produksinya salah satunya dengan cara menambah tenaga kerja sehingga akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. 3) Variabel Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran Terdidik. Hal ini mungkin disebabkan oleh besarnya Angkatan Kerja di Jawa Timur didominasi oleh pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah (SMP/Sederajat sesuai data BPS) dan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu dibutuhkan tenaga produksi yang besar pula. Sedangkan untuk menekan biaya produksi, perusahaan atau kegiatan usaha lainnya lebih mengutamakan tenaga kerja berpendidikan “sedang” dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik (SMA Sederajat). Sehingga semakin besar jumlah Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah Pengangguran Terdidik di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah variabel PDRB dan Inflasi, Angkatan secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan pada besarnya variabel penyerapan tenaga kerja. Saran penelitian ini antara lain Pemerintah hendaknya meningkatkan PDRB di Jawa Timur, hal ini dapat dilakukan dengan stimulus atau rangsangan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat desa maupun kota serta mampu mengendalikan laju inflasi, sehingga penataan angkatan kerja dapat berjalan optimal dan dapat mengurangi jumlah Pengangguran Terdidik di Jawa Timur.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh PDRB, Inflasi, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2012-2018”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, dorongan, nasehat, kasih sayang serta kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dari hati yang terdalam kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Dr. Moh. Adenan, M.M. selaku dosen pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesediaan untuk memberikan bimbingan, memberikan kritik dan saran yang membangun, arahan yang memotivasi dan bermanfaat, kesabaran, keikhlasan, yang tidak dapat dinilai dengan apapun dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mohammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jember.
3. Ibu Dr. Riniati, M.P. selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jember.
4. Bapak Adhitya Wardhono SE, M.Sc, Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
6. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember.

7. Keluarga tercinta, Ahmad Ansori dan Ibunda Faiq Rovidah, adikku Muvan Nawal. Terima kasih telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi, perhatian yang tak terhingga serta pengorbanannya sehingga saya mampu menempuh pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi.
8. Para guru mulai dari TK hingga SMA yang telah memberikan ketulusan hati untuk membimbing, memberikan ilmu, menginspirasi, memberi dukungan dan nasehat yang bermanfaat.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam menyusun skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 12 November 2020

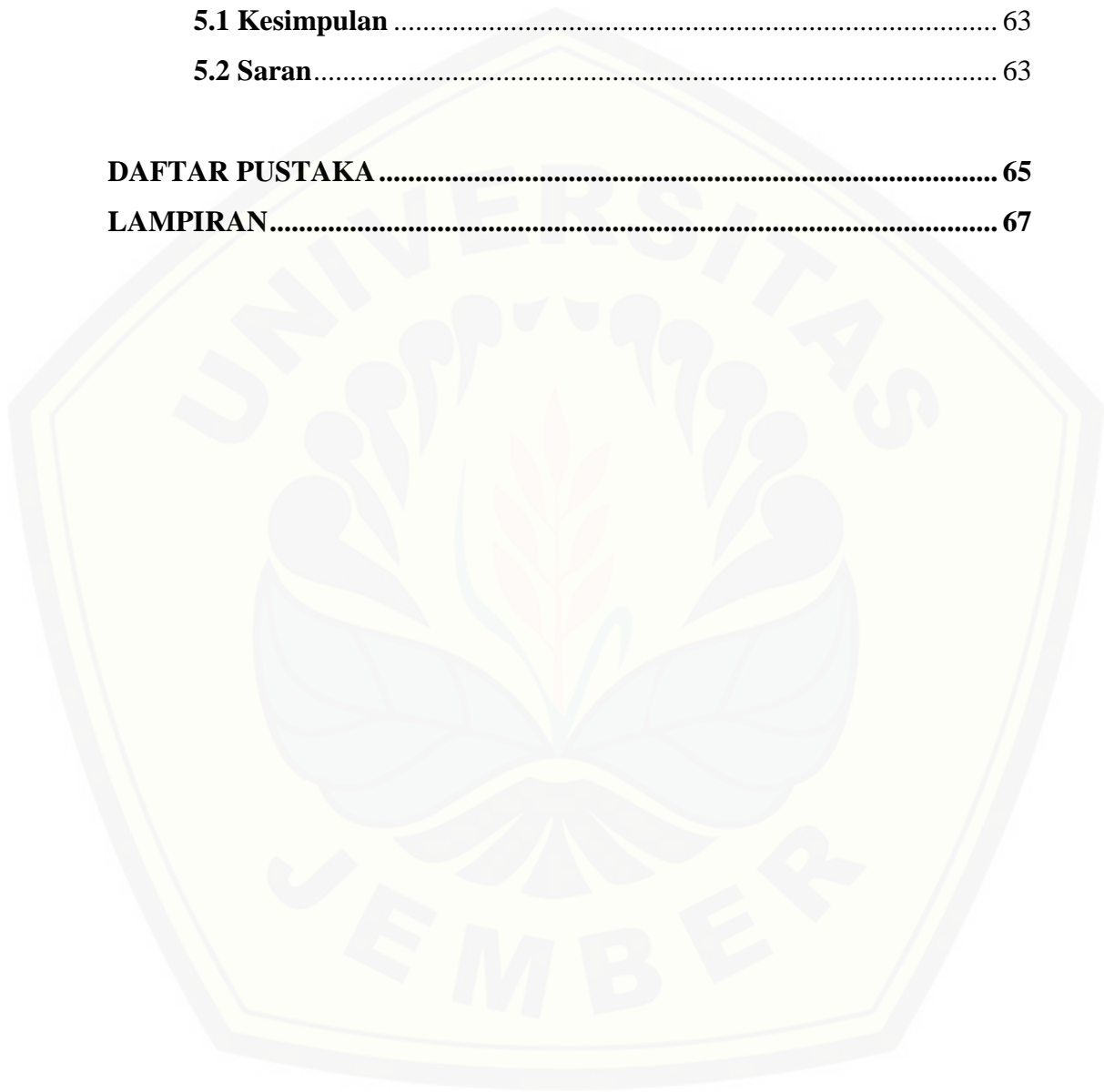
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR MOTTO	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PEMBIMBING SKRIPSI	v
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM).....	6
2.1.1 Pengertian ESDM.....	6
2.1.2 Ruang Lingkup ESDM.....	7
2.1.3 Perkembangan Pemikiran Ekonomi Sumber Daya Manusia.....	9

2.2 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14
2.4 Angkatan Kerja	16
2.5 Inflasi	17
2.5.1. Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi	21
2.5.2 Dampak Inflasi	23
2.6 Pengangguran	24
2.7 Pengangguran Terdidik	27
2.8 Penelitian Terdahulu	29
2.9 Kerangka Konseptual	32
2.10 Hipotesis	33
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.1.2 Objek Penelitian	34
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.2 Metode Analisis Data	34
3.2.1 Analisis Data Panel	35
3.2.2 Model Regresi Data Panel.....	35
3.2.3 Uji Statistik.....	36
3.2.4 Uji Asumsi Klasik	38
3.3 Definisi Variabel Operasional	40
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Jawa Timur	42
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	45
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.2.3. Uji Spesifikasi Model.....	54
4.2.4. Hasil Analisis Data	56

4.2.5. Uji Hipotesis Penelitian.....	58
4.6 Pembahasan	59
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

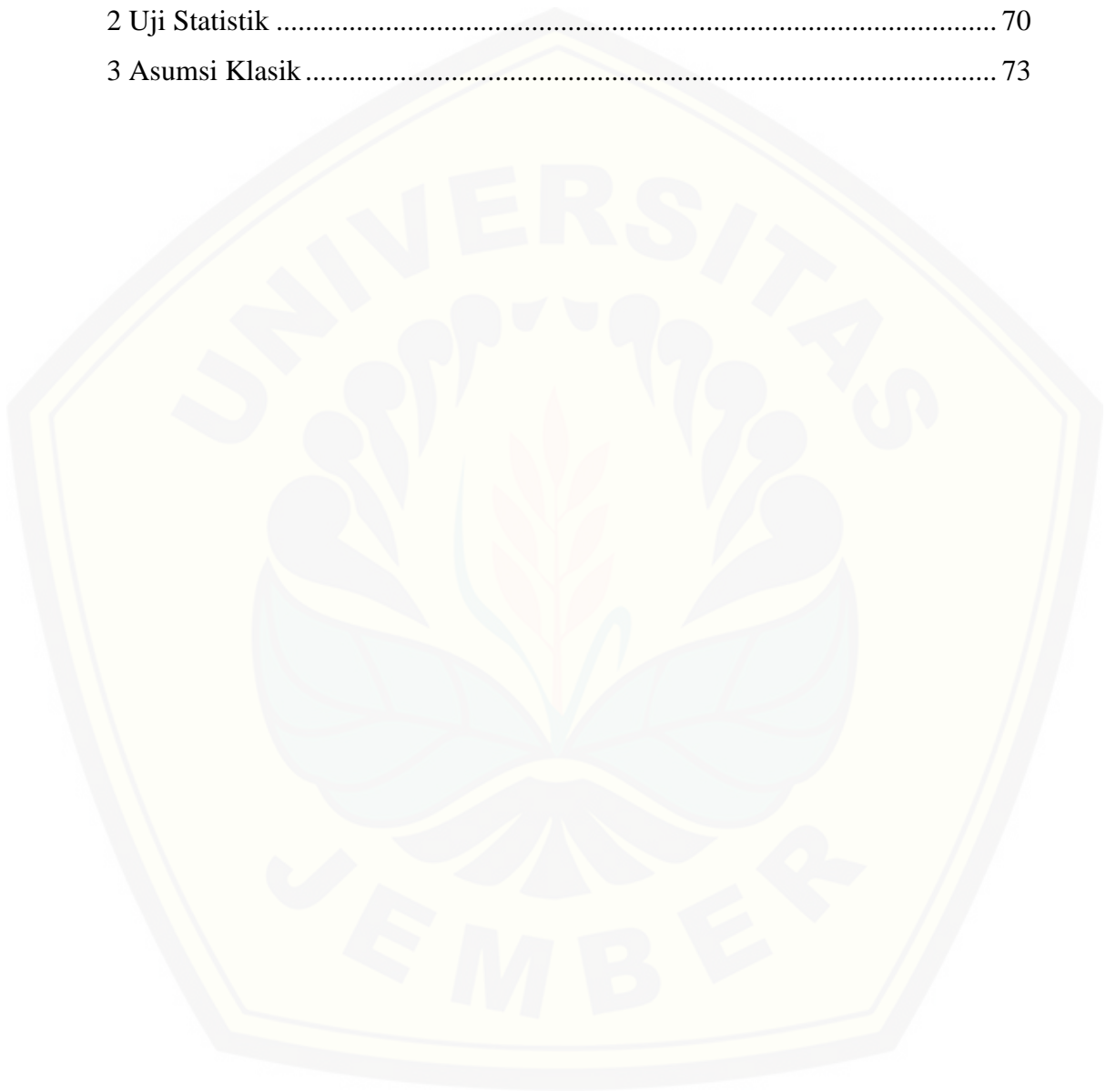
	Halaman
1.1 Jumlah Pengangguran di Indonesia.....	1
1.2 Data Inflasi Jawa Timur 2012-2018.....	2
1.3 PDRB Jawa Timur 2012-2018.....	3
1.4 Jumlah Pengangguran di Jawa Timur tahun 2012-2018.....	4
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
4.1 Hasil Seleksi Data Penelitian	44
4.2 Pengangguran Terdidik pada 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2018	45
4.3 PDRB pada 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2018	46
4.4 Inflasi pada 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2018	47
4.5 Angkatan Kerja pada 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2018	49
4.6 Statistik Deskriptif variabel penelitian.....	50
4.7. Uji Autokorelasi menggunakan nilai DW.....	52
4.8. Uji Multikolonieritas melalui uji korelasi.....	53
4.9. Hasil Uji Chow.....	55
4.10. Uji Hausman	55
4.11. Hasil Uji Regresi Data Panel menggunakan model <i>Fixed Effect</i>	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Data Perkembangan Inflasi Jawa Timur 2012-2018.....	2
1.2 PDRB Jawa Timur 2012-2018	3
1.3. Jumlah Pengangguran di Jawa Timur 2012-2018.....	4
2.1 Perkembangan PDRB Jawa Timur tahun 2010-2019	16
2.2. Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Timur tahun 2011-2018	19
2.3. Kerangka Konseptual Penelitian	32
4.1. Peta Jawa Timur.....	42
4.2. Uji Normalitas	52
4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Entri Data Penelitian	68
2 Uji Statistik	70
3 Asumsi Klasik	73



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar merupakan negara berkembang. *Worldometers* mempublikasikan bahwa saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 3,49% dari total populasi dunia atau sebesar 269 juta jiwa. Indonesia berada di posisi terkahir dari negara dengan penduduk paling banyak di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok dan India (*Worldometers*, 2019)

Sebanyak 150 juta jiwa penduduk Indonesia atau 56% adalah masyarakat yang berkarakter urban. Pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk dari 261,1 juta jiwa tahun 2017 bertambah menjadi 263,9 juta jiwa. Pada 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia jika tidak dimanajementi dengan baik, akan berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin membanjir. Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 yang memberikan keleluasaan tenaga kerja asing masuk ke Negara Indonesia akan memperkeruh persaingan di dunia persaingan kerja.

Angkatan kerja dapat menjadi pemicu jumlah pengangguran, semakin tinggi angkatan kerja, tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah pengangguran, seperti tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran di Indonesia

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	
			Jiwa	%
2013	121.819.813	114.061.982	7.757.831	15,70
2014	123.170.509	115.929.612	7.240.897	17,01
2015	125.316.991	118.169.922	7.147.069	17,53
2016	128.301.588	120.846.821	7.454.767	17,21
2017	127.671.869	120.647.697	7.024.172	18,18
2018	131.544.111	124.538.849	7.005.262	18,78

Sumber : BPS, 2019

Selain Angkatan kerja, jumlah pengangguran juga dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum yang dapat berakibat pada peningkatan tingkat bunga pinjaman, hal ini akan berdampak pada mengurangnya investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Darwin, 2016) (Darwin, 2016; X, tanpa tahun) (Sukirno, 2008)

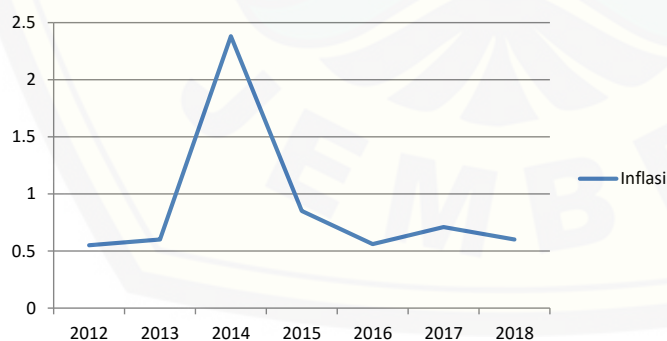
Tingkat Inflasi di Jawa Timur setiap tahun selalu mengalami fluktuasi. Perkembangan data inflasi di Jawa Timur seperti pada tabel 1.2:

Tabel 1.2. Data Inflasi Jawa Timur 2012-2018

No	Tahun	Inflasi
1	2012	0.55
2	2013	0.60
3	2014	2.38
4	2015	0.85
5	2016	0.56
6	2017	0.71
7	2018	0.60

Sumber : BPS, 2019

Data inflasi pada tabel 1.2 di atas, disajikan dalam bentuk gambar seperti di bawah ini :



Gambar 1.1 Data Perkembangan Inflasi Jawa Timur 2012-2018

Sumber : BPS, 2019

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa selain inflasi, PDRB juga mempengaruhi tingkat pengangguran. PDRB yang tinggi bisa mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menggarap beragam sektor, PDRB yang tinggi

dapat menjadi indikasi perdagangan makin aktif sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

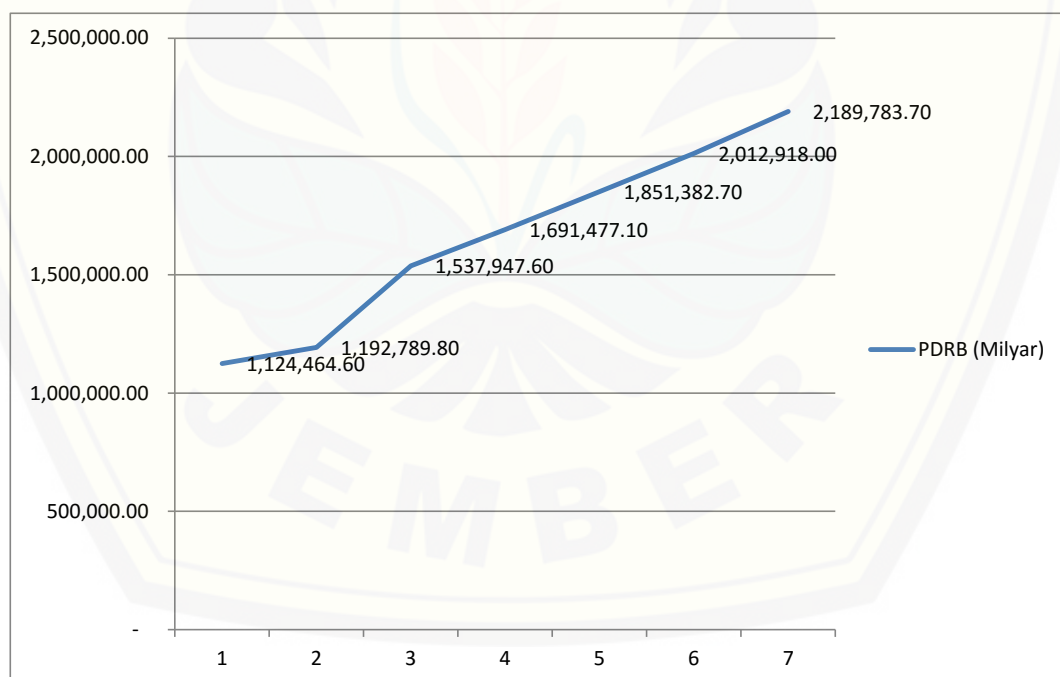
Tabel 1.3 ini menunjukkan perkembangan PDRB Jawa Timur sejak tahun 2015-2018 yang diperoleh dari BPS :

Tabel 1.3 PDRB Jawa Timur 2012-2018

Tahun	PDRB (Milyar)
2012	1,124,464.60
2013	1,192,789.80
2014	1,537,947.60
2015	1,691,477.10
2016	1,851,382.70
2017	2,012,918.00
2018	2,189,783.70

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019

Data PDRB tabel 1.3 di atas, disajikan dalam bentuk gambar 1.2 seperti tabel di bawah ini :



Gambar 1.2 : PDRB Jawa Timur 2012-2018

Sumber : BPS, 2019

Namun Kasanah dkk., (2018) menyebutkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran yang diperkuat oleh hasil penelitian Namira dkk., (2019) Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Soekarnoto (2014) yang mendapatkan fakta bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran yang diperkuat oleh hasil penelitian Hidayat (2017).

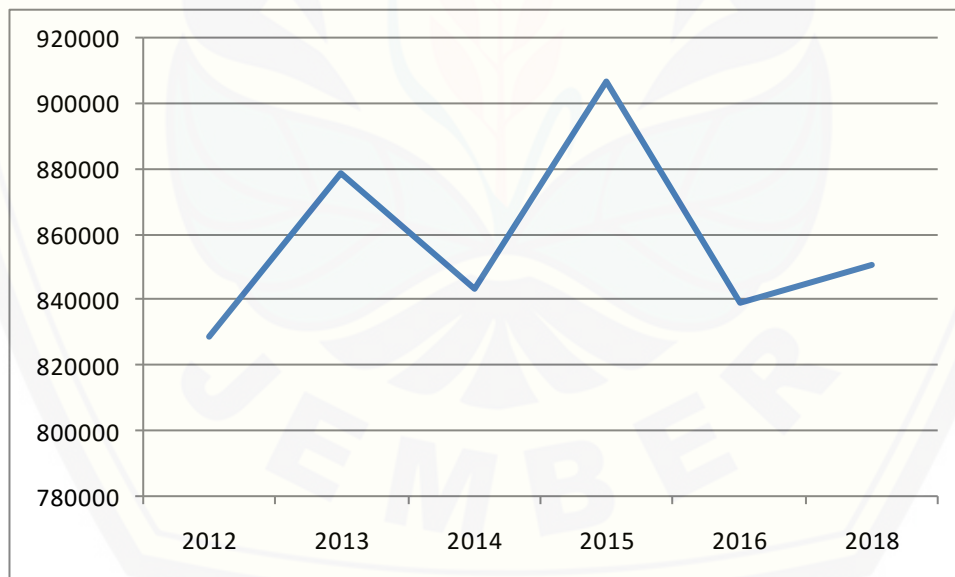
Dari data yang dihimpun oleh peneliti melalui BPS, jumlah pengangguran terdidik di Jawa Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya, seperti tabel 1.4.

Tabel 1.4. Jumlah Pengangguran di Jawa Timur tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Pengangguran (Jiwa)
2012	828.615
2013	878.543
2014	843.490
2015	906.904
2016	839.283
2018	850.474

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019

Data Pengangguran pada tabel 1.4, disajikan dalam bentuk gambar 1.3 berikut ini :



Gambar 1.3. Jumlah Pengangguran di Jawa Timur 2012-2018

Sumber : BPS, 2019

Jumlah pengangguran di Jawa Timur mengalami perubahan setiap tahunnya, namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi menarik untuk didalami

lebih lanjut faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Timur tahun 2012-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adapun antara lain :

1. Apakah PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur?
2. Apakah Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur?
3. Apakah Angkatan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini yang diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bentuk pengembangan hasil penelitian empiris dan menjadi rujukan kajian untuk penelitian selanjutnya dalam hal yang bersangkutan dengan pengangguran.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk menyusun kebijakan strategis dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM)

2.1.1. Pengertian ESDM

Andriyani (2012) dalam bukunya menyebutkan bahwa ilmu Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas.

Sedangkan Sumberdaya, berdasarkan literatur ekonomi sumberdaya, pengertian atau konsep sumberdaya didefinisikan cukup beragam, ensiklopedia Webster, misalnya, mendefinisikan sumberdaya sebagai kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, sumber persediaan, penunjang, atau sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Sedangkan menurut Rees (1990) sesuatu dikatakan sumberdaya harus memiliki dua kriteria yaitu harus adanya keterampilan, pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkannya dan harus ada permintaan terhadapnya.

Pengertian Manusia yang dimaksud disini harus dipandang sebagai manusia yang holistik maksudnya dalam memandang manusia itu tidak hanya sebagian saja, akan tetapi secara menyeluruh, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Manusia sebagai makhluk biologis mempunyai kaidah jasmaniah yang terpadu dengan sistem organik, Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai jiwa (psikologis) yang dipengaruhi oleh perasaan dan mempunyai dasar pikir karena memiliki intelegensi dan akal.

Manusia sebagai makhluk sosial, manusia dilahirkan untuk hidup berkelompok dengan norma serta sistem. Dan manusia sebagai makhluk dengan dasar spiritual memiliki keyakinan dan kepercayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan merupakan makhluk bio-psiko-sosial-kultural mempunyai kebutuhan dasar yang beragam sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Berdasarkan pengertian dari masing masing unsur diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi atau ekonomi sumber daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia (Subri, 2003).

2.1.2. Ruang Lingkup ESDM

Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia berisi gambaran mengenai hal-hal dalam menopang pembangunan berkelanjutan. Hal-hal tersebut antara lain berupa ketenagakerjaan, dinamika kependudukan, struktur ketenagakerjaan, transisi kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerja anak, perencanaan ketenagakerjaan, sektor informal, sector formal, penduduk dan pembangunan ekonomi. Dapat dilihat dalam ruang lingkupnya, bahwa secara garis besar ekonomi sumber daya manusia berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia, ekonomi ketenagakerjaan, dan ekonomi kependudukan.

Melihat ruang lingkup tersebut berarti ekonomi sumber daya manusia (*Human Resources Economic*) berkaitan dengan studi : perencanaan sumber daya manusia (*human resources planning*), ekonomi ketenagakerjaan (*Labur Economics*) dan ekonomi kependudukan (*Population Economics*)

Ekonomi sumber daya manusia mempelajari tentang berbagai hal yaitu perencanaan sumber daya manusia (*Human Resources Planning*), Ekonomi Ketenagakerjaan (*Labor Economics*), dan Ekonomi Kependudukan (*Population Economics*) (Andriyani, 2012). Berikut akan diuraikan secara singkat masing-masing studi dan kaitannya dengan Ekonomi sumber daya manusia :

1. Perencanaan Sumber daya Manusia (*Human Resources Planning*)

Perencanaan sumber daya manusia memfokuskan pada penyediaan angkatan kerja dengan pengetahuan dan ketrampilan tinggi serta penciptaan kesempatan kerja, kemudian membawa pada arah telaahan perencanaan sumber

daya manusia yang meliputi analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Pembangunan sumberdaya manusia berarti peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat. Menurut Harbinson dan Myres dalam Aris Ananta (1990) masalah umum dalam pembangunan ekonomi sumber daya manusia adalah kurangnya pekerja tingkat tinggi dengan keahlian yang dibutuhkan dan tidak termanfaatkannya tenaga kerja yang ada. Oleh sebab itu dengan perencanaan tenaga kerja dapat dibuat suatu kegiatan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk penciptaan kesempatan kerja agar angkatan kerja yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Adanya penekanan perhatian pada penyediaan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan tinggi serta penciptaan kesempatan kerja membawa arah telaah perencanaan sumber daya manusia ke analisis penawaran dan permintaan pekerja pada masa yang akan datang. Dalam perencanaan tenaga kerja berdasarkan *Manpower Requerement Approach* misalnya, berbagai usaha akan dilakukan untuk membandingkan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada masa yang akan datang yang kemudian dilihat ada tidaknya kesesuaian antara penawaran dan permintaan pekerjaan. Jika tidak ada kesesuaian antara keduanya dimana penawaran tenaga kerja yang berketrampilan dan berpengetahuan tinggi lebih sedikit dibanding dengan permintaan tenaga kerja maka disarankan adanya berbagai intervensi dalam bidang pendidikan dan latihan.

2. Ekonomi Ketenagakerjaan (*Labor Economics*)

Ekonomi Ketenagakerjaan (*Labor Economics*), memperhatikan masalah serikat pekerja, hukum ketenagakerjaan, asuransi sosial ketenagakerjaan, diskriminasi terhadap gender dalam perusahaan dan manajemen perusahaan. Analisis dalam Ekonomi ketenagakerjaan sangat sedikit menggunakan teori ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak terhadap pendekatan ini. Salah satu golongan yang merasa tidak puas dengan cara analisis seperti di atas adalah ekonom ekonom dari Universitas Chicago (yang dipelopori oleh Gregg H. Lewis). Mereka menyebut bahwa ekonomi ketenaga kerjaan seperti di atas adalah ekonomi ketenagakerjaan kelembagaan (*institutional labor*

economics). Ekonom seharusnya mempunyai sumbangan tersendiri dalam analisis ketenagakerjaan, tepatnya ekonom harus menggunakan teori ekonomi untuk menganalisis ketenagakerjaan, hal tersebut tidak berarti meniadakan analisis yang lain. Analisis ketenagakerjaan dengan menggunakan teori ekonomi ini mereka sebut dengan ekonomi ketenagakerjaan analitis (*analytical labor economics*).

Pada mulanya terbatas hanya memakai teori ekonomi mikro, tetapi pada perkembangan berikutnya, berkembanglah teori *new homes economics* yang menganalisis investasi dalam modal manusia. Analisis dilakukan terhadap faktor yang menyebabkan seseorang ingin bekerja dan bila ingin bekerja berapa banyak waktu yang dicurahkan dalam kerja..Kerja menyangkut analisis alokasi waktu di pasar kerja dan dirumah tangga, maka analisis ini tidak dapat luput dari analisis berbagai kegiatan dalam rumah tangga seperti perkawinan, kelahiran. Ekonomi ketenagakerjaan analitis maupun ekonomi ketenagakerjaan kelembagaan banyak membahas permasalahan dinegara maju, oleh sebab itu untuk menganalisis permasalahan di negara berkembang perlu penyesuaian.

3. Ekonomi Kependudukan (*Population Economics*)

Cakupan pembahasan ekonomi kependudukan adalah masalah ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan seperti misalnya pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan dampak pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi. dalam ekonomi kependudukan juga sering diterapkan *new homes economics* yang membahas untung rugi memiliki anak, untung rugi melakukan migrasi, interaksi antara jumlah dan mutu penduduk.

2.1.3. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Sumber Daya Manusia

Adapun perkembangan pemikiran dari teori Ekonomi Sumber Daya Manusia menurut Andriyani (2012) adalah sebagai berikut :

1. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama aliran klasik. Adam Smith telah mencurahkan perhatian pada alokasi sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menganggap bahwa manusia merupakan factor

produksi utama yang akan menentukan kemakmuran karena tanah tidak akan berarti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Menurut teori klasik kondisi full employment akan selalu terjadi karena gaji berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (upah bersifat fleksibel). Penawaran dan permintaan tenaga kerja berpotongan pada tingkat gaji 1. Adanya pasar persaingan sempurna dan tiap industri terintegrasi secara vertical. 2. Tidak ada serikat buruh yang efektif 3. Terjaminnya mobilitas pekerja antar industri/ perusahaan dan daerah 4. Tersedianya informasi lengkap dan bebas untuk semua pekerja (Ananta, 1990).

2. Teori Malthus Thomas

Robert Malthus (1766- 1834) juga merupakan salah satu tokoh aliran klasik. Bukunya yang sangat terkenal adalah *Principles of Population*. Walaupun Malthus seialiran dengan Adam Smith tetapi tidak semua pemikiran Adam Smith sejalan dengan pemikiran Malthus.

Adam Smith menganggap bahwa tingkat kesejahteraan manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari adanya spesialisasi, namun sebaliknya Malthus pesimis dengan masa depan manusia. Malthus melihat bahwa tanah sebagai salah satu factor produksi, luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk menghasilkan bahan makanan karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain. Di sisi yang lain jumlah manusia terus bertambah sehingga rata-rata produksi makanan yang tersedia semakin menurun, jumlah makanan menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berdampak pada perebutan makanan. Muncullah perang dan wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Penurunan jumlah penduduk menyebabkan makanan berlimpah lagi, penduduk meningkat lagi demikian seterusnya. Malthus tidak percaya terhadap kemampuan teknologi dalam perlombaan dengan perkembangan jumlah penduduk. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi akan berakibat terhadap penurunan produksi per kapita. Satu-satunya cara untuk menghindar dari malapetaka tersebut adalah melakukan pengendalian terhadap jumlah penduduk,

dengan pengendalian moral yaitu penundaan usia perkawinan, mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan persoalan akan diselesaikan dengan cara alami antara lain akan timbul perang, epidemic, kekurangan pangan dan sebagainya.

3. Teori Keynes

Pemikiran John Meynard Keynes (1936) sebenarnya merupakan kelanjutan dan penajaman kritik Malthus terhadap hukum Say. Menurut Keynes terjadinya depresi besar pada tahun 30 an adalah karena kurangnya permintaan agregatif di masyarakat. Kurangnya permintaan ini menghalangi terjadinya kegiatan produksi, walaupun sebenarnya masyarakat mampu melakukannya (masyarakat banyak yang menganggur). Salah satu implikasi dari kebijakan Keynes adalah bahwa dalam jangka pendek aggregate demand harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan employment. Multipliernya akan lebih besar jika peningkatan aggregate demand berasal dari peningkatan investasi, sehingga dapat dikatakan bukan *supply creates its own demand* seperti yang dikatakan Say tetapi *demand its own supply*. Dengan kata lain peningkatan permintaan akan meningkatkan employment hanya bila tersedia kapasitas produksi yang belum digunakan. Kapasitas produksi ini berkaitan dengan modal fisik dan modal manusia.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan dapat bermakna pada dua hal, yaitu baik dan buruk, jika pada suatu waktu perekonomian mengalami pertumbuhan, maka kegiatan ekonomi berkesan baik. Tetapi jika suatu waktu perekonomian mengalami penurunan, berarti kegiatan ekonomi berkesan buruk. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Hal inilah membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi dambaan semua negara.

Menurut Pujoalwanto dalam Khotimah (2018) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian

yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian terjadi secara bertahap dan memerlukan faktor pendorong seperti modal, sumber daya manusia, dan teknologi, seperti yang dinyatakan oleh Simon Kuznet dalam Jhingan (2000) yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan menyesuaikan dengan kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi ini memiliki tiga komponen; 1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus penyediaan barang, 2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, 3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum istilah pertumbuhan ekonomi besarnya digunakan menyatakan perkembangan ekonomi di Negara-negara maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di Negara sedang berkembang (Arsyad, 2014).

Arthur Okun (1929-1979) adalah salah seorang pembuat kebijakan paling kreatif pada era sehabis perang. Ia membuat konsep output potensial dan menunjukkan hubungan antara output dan pengangguran. Pengangguran biasanya bergerak bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran yang luar biasa ini berbarengan dengan hubungan numerikal yang sekarang dikenal dengan nama Hukum Okun. Hubungan antara tingkat GDP yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran didasarkan pada hukum Okun (Okun's Law) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat GDP suatu Negara. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja. Pada siklus bisnis, pengangguran bergerak bersamaan dengan output. Agar pengangguran tidak meningkat maka GDP harus ditingkatkan setinggi-tingginya (Samuelson dkk., 2001).

Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi/rendahnya tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan pertumbuhan GDP dalam negara tersebut atau untuk skala yang lebih kecil lingkungannya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berarti peningkatan pendapatan daerah. Dapat di simpulkan bahwa Hukum Okun (Okun's law) menjelaskan hubungan yang negatif antara pengangguran dengan PDRB. Bahwa setiap peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, sehingga, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, maka jumlah pengangguran akan cenderung meningkat, Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka masalah pengangguran dapat berkurang.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah (Sukmaraga, 2011: 31).

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Menurut Badan Pusat Statistik angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi digunakan untuk menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh segala kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Pendekatan ini banyak digunakan pada perkiraan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Di Indonesia sendiri dalam menghitung pendapatan nasional maupun regional dari sisi produksi terdiri dari penjumlahan sembilan sektor ekonomi/lapangan usaha antara lain:

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
- c. Sektor Industri
- d. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Sektor Bangunan/ Konstruksi
- f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- i. Sektor Jasa-jasa (Badan Pusat Statistik, 2009)

2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan maka nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Penjumlahan semua komponen ini disebut NTB, untuk tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang dimaksud surplus usaha di sini adalah bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti pada subsektor pemerintahan umum. Hal ini disebabkan tidak tersedianya atau kurang lengkapnya data mengenai nilai produksi dan biaya antara (Production Account)

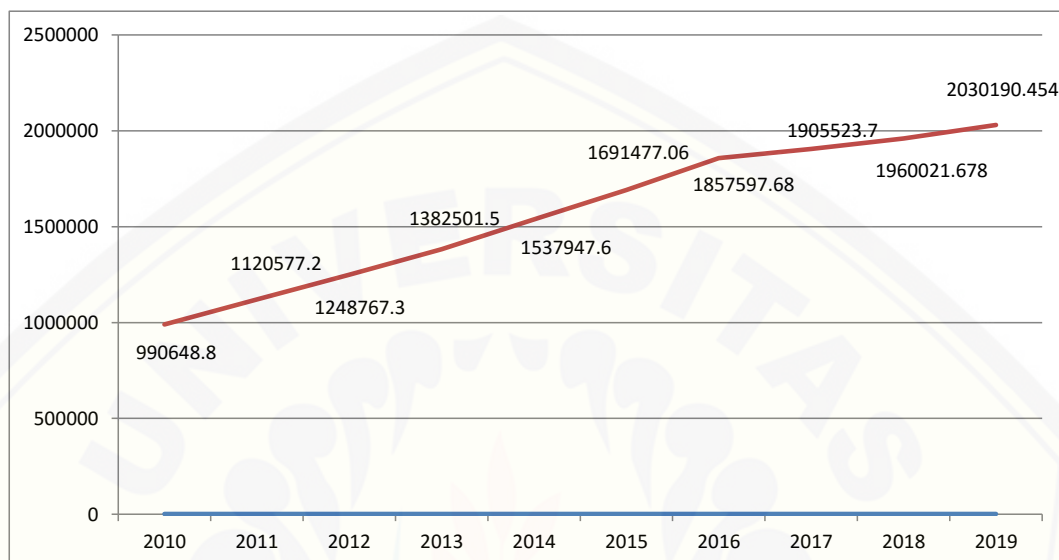
3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk:

- a. Konsumsi rumah tangga,
- b. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
- c. Konsumsi pemerintah,

- d. Pembentukan modal tetap bruto (investasi),
- e. Perubahan stok, dan
- f. Ekspor netto (Badan Pusat Statistik, 2009)

Perkembangan PDRB di Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Perkembangan PDRB Jawa Timur tahun 2010-2019

Sumber : (BPS, 2019)

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa PDRB yang tinggi bisa mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menggarap beragam sektor, PDRB yang tinggi dapat menjadi indikasi perdagangan makin aktif sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

2.4. Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan, penduduk yang telah memasuki usia kerja (*working age population*). Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah

berumur 15-64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Banyak hal mengenai kehidupan sosial di suatu negara/masyarakat dapat dijabarkan jika diketahui mengenai komposisi lapangan pekerjaan dari angkatan kerjanya, komposisi jenis pekerjaan dan fakta-fakta lain mengenai angkatan kerja. Misalnya: apakah para penduduk muda (*young population*) berusia terlalu muda untuk memasuki angkatan kerja, hingga belum bisa mendapatkan pendidikan yang relatif cukup tinggi? Kemudian berapa banyakkah penduduk tua (*old population*) dipaksa untuk tetap tinggal dalam angkatan kerja setelah usia pensiun?

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya adalah seluruh penduduk berusia 15–64 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (hasil sensus penduduk 1971 dan 1980). Jadi, tenaga kerja (*man power*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.

Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab. Angkatan kerja (*labour force*) secara demografi angkatan kerja bergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa. Kelompok angkatan kerja terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu:

1. Angkatan kerja yang bekerja

- a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari.

- b. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah pekerja tetap, petani-petani dan orang-orang yang bekerja dalam keahlian.

2. Angkatan kerja yang mencari pekerjaan

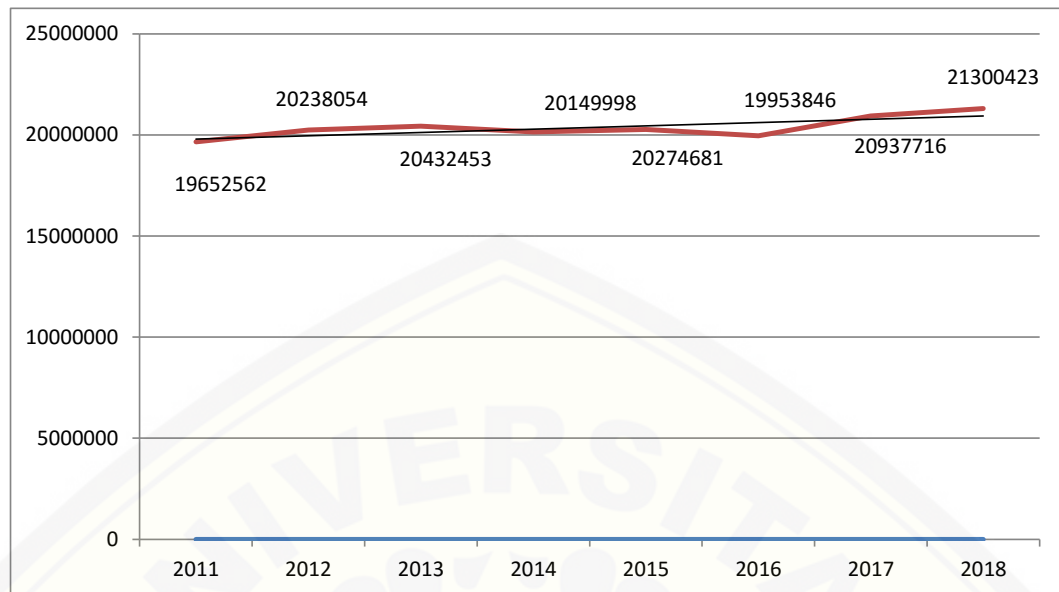
- a. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari/mendapatkan pekerjaan.
- b. Mereka yang bekerja, pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan.
- c. Mereka yang dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja (*not in the labour force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi, mereka bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

1. Sekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah.
2. Mengurus rumah tangga adalah untuk mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
3. Penerimaan pendapatan adalah untuk mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan, misalnya pensiun, bunga simpanan, hasil persewaan dan sebagainya.
4. Lainnya adalah untuk mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena usia lanjut, lumpuh, dungu dan sebagainya.

Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Timur dapat dilihat pada gambar

2.1:



Gambar 2.2. Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Timur tahun 2011-2018
Sumber : BPS Jawa Timur, 2019

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja dapat menjadi pemicu jumlah pengangguran, semakin tinggi angkatan kerja, tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah pengangguran.

2.5. Inflasi

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga (BI, 2019). Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Yang pertama adalah “kenaikan harga secara umum” dan yang kedua adalah “terus-menerus”. Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas

barang dan jasa tertentu. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Kata kunci kedua adalah terus menerus, kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya, menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan “masalah kronis” ekonomi.

Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut (BI, 2019).

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian (Sukirno, 2002). Hubungan Inflasi dengan Pengangguran dapat dilihat dari pendapat Phillip, yang mengenalkan kurva Phillips.

Pada tahun 1958, AW Phillips, seorang Profesor di London *School of Economics* menulis artikel berdasarkan studi lapangan tentang adanya hubungan antara kenaikan tingkat upah dan pengangguran di Inggris pada tahun 1861-1957. Dari hasil studi ini maka diperoleh hubungan negatif antara presentase kenaikan upah dengan pengangguran. Kurva Phillips juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Ini berarti sifat perkaitan antara inflasi harga dan tingkat pengangguran tidak berbeda dengan sifat hubungan antara inflasi, upah dan tingkat pengangguran seperti yang diterangkan di atas. Pada waktu pengangguran tinggi, kenaikan harga-harga relatif lambat, akan tetapi makin rendah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi yang berlaku.

Kurva Phillips adalah kurva yang menjelaskan suatu hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan kenaikan upah nominal, Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dengan kata lain terdapat *trade off* antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips menunjukkan bahwa tingkat inflasi menurun seiring dengan kenaikan tingkat pengangguran.

Kurva Phillips berimplikasi bahwa upah dan harga menyesuaikan diri secara lambat terhadap permintaan agregat. Kurva Phillips dengan cepat dengan cepat menjadi pondasi dari analisa kebijakan makroekonomi. Kurva Phillips menyarankan bahwa kebijakan dapat memilih kombinasi yang berbeda-beda antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002).

2.5.1 Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi

Dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun ekspektasi. Faktor yang juga menyebabkan inflasi tersebut dapat merupakan gabungan dari ketiga faktor tersebut.

1. Inflasi Permintaan

Inflasi permintaan adalah inflasi yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul apabila permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi output yang tersedia. Yang dimaksud dengan permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian. Jumlah barang dan jasa yang

dikonsumsi dan diinvestasikan tersebut digambarkan oleh Produksi Domestik Bruto (PDB) perekonomian yang bersangkutan. Sementara itu, yang dimaksud dengan penawaran agregat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk dapat memenuhi permintaan agregat. Perbedaan antara permintaan dan penawaran agregat disebut output gap. Apabila permintaan agregat lebih besar dibanding potensi output yang tersedia, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, output gap dapat dipergunakan sebagai indikator apakah terdapat tekanan terhadap laju inflasi. Namun, perlu dicatat bahwa output gap tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi ekonomi yang normal. Dalam keadaan tertentu, output gap tidak dapat dipergunakan sebagai indikator yang baik. Misalnya, dalam keadaan ekonomi setelah terjadinya krisis, atau suatu perekonomian yang mengalami stagnasi yang disertai inflasi (stagflasi).

2. Inflasi Penawaran

Faktor kedua yang menyebabkan inflasi adalah faktor penawaran, dan inflasi yang ditimbulkan sering disebut sebagai *cost push* atau *supply shock inflation*. Jenis inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Termasuk dalam jenis inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang (termasuk barang-barang yang harus diimpor), serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Contoh : adanya kenaikan harga minyak dunia, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Di samping itu, inflasi juga disebabkan oleh faktor alam misalnya, gagalnya panen atau panen yang berlebih, faktor-faktor sosial ekonomi, misalnya, adanya masalah atau hambatan dalam distribusi suatu barang, atau faktor-faktor yang timbul karena kebijakan tertentu, misalnya, karena adanya kebijakan tarif, pajak, pembatasan impor, atau kebijakan lainnya.

3. Inflasi Ekspektasi

Faktor ketiga yang menyebabkan inflasi adalah ekspektasi. Faktor yang menyebabkan inflasi tidak hanya oleh faktor permintaan dan penawaran. Inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi para pelaku ekonomi atau yang sering disebut inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi sangat berperan dalam pembentukan harga dan juga upah tenaga kerja. Pembentukan inflasi ekspektasi yang bersifat adaptif (*backward expectation*) ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang antara lain sebagai berikut: i) inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, ii) inflasi penawaran yang besar atau sering terjadi, dan iii) inflasi penawaran yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Untuk mengurangi dampak ekspektasi inflasi adaptif ini perlu peningkatan kredibilitas (kebijakan) bank sentral. Bank sentral yang kredibel dapat menurunkan ekspektasi inflasi dan mendorong ekspektasi inflasi berdasarkan kondisi ekonomi ke depan (*forward looking*)

2.5.2 Dampak Inflasi

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, misalnya, pegawai negeri, adalah kelompok masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap tersebut akan menderita karena secara riil pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil. Sementara kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya inflasi.

Ketidakpastian besarnya laju inflasi juga dapat mengakibatkan semakin seriusnya beban atau bahaya inflasi. Laju inflasi yang terlalu berfluktuasi akan

menimbulkan distorsi terhadap tingkat harga. Dalam sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah tangga maupun dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu perekonomian. Contoh : apabila kenaikan harga tahu lebih besar dibandingkan harga tempe, maka hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memproduksi tahu dan mendorong orang akan lebih banyak mengkonsumsi tempe (dengan asumsi hal-hal lain tetap atau dalam istilah ekonominya ceteris paribus). Kenaikan harga-harga saham di pasar modal yang secara relatif lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya merupakan tanda-tanda membaiknya prospek dunia usaha, yang lebih lanjut berarti adanya kesempatan untuk melakukan berbagai investasi yang menguntungkan. Harga relatif (bukan harga satu persatu barang dan jasa) merupakan sinyal yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil berbagai keputusan yang strategis.

Apabila laju inflasi bergejolak (sangat berfluktuasi) dan tidak menentu, maka harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya karena keadaan tersebut akan mendistorsi sinyal ekonomi yang sangat penting dalam suatu perekonomian, yaitu harga. Perubahan dan variasi harga relatif yang timbul karena adanya ketidakpastian harga (inflasi) dapat mengakibatkan masyarakat (individu dan dunia usaha) memboroskan sumber-sumber daya ekonomi untuk mencari harga yang berbeda-beda.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, jumlah pengangguran juga dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum yang dapat berakibat pada peningkatan tingkat bunga pinjaman, hal ini akan berdampak pada mengurangnya investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Sehingga akan berpengaruh pada pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

2.6. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang biasa dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran juga merupakan

masalah yang selama ini penanggulangannya sangat sulit untuk dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai cara dan program untuk mengurangi tingkat pengangguran, namun hasilnya tingkat pengangguran di Indonesia setiap tahunnya masih mengalami naik turun.

1. Definisi Pengangguran

Pengangguran secara umum adalah orang yang tidak bekerja atau tidak ikut andil dalam suatu produksi. Menurut BPS pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak atau sedang mempersiapkan usaha mandiri. Pengangguran biasanya disebabkan bukan hanya karena keinginan dari dalam diri seseorang (sukarela) tetapi juga karena keadaan (terpaksa). Lapangan pekerjaan yang kurang memadai menjadikan banyak angkatan kerja yang seharusnya produktif menjadi pengangguran. Dengan keadaan Indonesia saat ini, jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menyebabkan jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Menurut (Sukirno, 2011) pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan memiliki beberapa efek buruk terhadap perekonomian, politik, dan sosial. Misalnya dengan banyaknya pengangguran maka produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang dan akibat lainnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan merupakan tugas berat bagi pemerintah untuk mengatasinya. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja:

“Pengangguran merupakan masalah nasional dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penanggulangan masalah pengangguran harus dilakukan oleh semua stakeholders terkait secara bersamaan dan terintegrasi antar lintas sektor dan masyarakat dengan cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”.

Jadi pengangguran dapat didefinisikan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan atau sedang menyiapkan usaha mandiri. Pengangguran juga merupakan masalah yang kompleks maka apabila masalah ini tidak kunjung diselesaikan maka akan menimbulkan efek yang lebih buruk bagi perekonomian, politik, dan sosial.

2. Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah serius yang banyak dialami oleh berbagai negara terutama negara berkembang. Oleh karena itu pengangguran selalu masuk dalam pembahasan rencana pembangunan ekonomi suatu negara yang dikaitkan dengan tujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor berbeda sehingga pengangguran dapat digolongkan berdasarkan penyebab dan cirinya. Menurut Kusnendi (2003) pengangguran terdapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu; 1) pengangguran friksional terjadi karena adanya hambatan untuk terjadinya pertemuan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, 2) pengangguran siklis terjadi karena naik turunnya kegiatan ekonomi, 3) pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian, 4) pengangguran musiman terjadi karena disebabkan oleh perubahan musim/iklim, dan 4) pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia tergantikan oleh mesin.

Pengangguran tidak hanya dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya tetapi juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya yaitu: 1) pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menyiapkan usaha mandiri, 2) pengangguran tersembunyi terjadi apabila jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien, dan 3) setengah menganggur adalah keadaan di mana pekerja hanya bekerja satu hingga dua hari selama seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.

2.7. Pengangguran Terdidik

2.7.1 Pengertian Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para penganggur terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di Negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat. Pada masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan dipersiapkan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan “pengangguran terdidik sebagai rasio antara jumlah pencari kerja yang berpendidikan pada tingkat SLTA keatas terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok berdasarkan pendidikan yang ditamatkan” (BPS, 2019).

Pengangguran tenaga kerja terdidik umumnya identik pada golongan usia muda yang berpendidikan. Menurut Mulyono (1997) dalam Muslim dkk., (2019) kelompok pengangguran terdidik kebanyakan merupakan “tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sesuai”. Selama menunggu kesempatan pekerjaan yang sesuai, biaya kebutuhan hidup yang diperlukan dapat ditanggung oleh keluarga, sebab status sosial keluarganya relatif mampu.

Menurut Mankiw (2007) pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja namun memiliki pendidikan SMA keatas. Sedangkan menurut Dinas Ketenagakerjaan pengangguran terdidik adalah seseorang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau pernah mendaftarkan diri untuk bekerja namun belum bekerja dengan jenjang pendidikan SMA ke atas. Pengangguran terdidik menyebabkan hasil output berkurang sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Pengangguran terdidik dapat mengurangi tingkat pendapatan pemerintah terhadap pajak karena kegiatan ekonomi yang menurun yang disebabkan oleh pengangguran. Pengangguran

terdidik dapat menyebabkan pendapatan masa lalu harus digunakan untuk hidup karena pengangguran terdidik dapat mengurangi pendapatan dan menghilangkan mata pencarian. Selain itu pengangguran terdidik dapat menyebabkan berkurangnya ketrampilan karena ketrampilan dapat meningkat apabila selalu diasah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para penganggur terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah keatas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat.

2.7.2. Penyebab Pengangguran Terdidik

Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tersebut tidak terserap kedalam lapangan kerja yang ada. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja bukan pencipta kerja.

Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran terdidik, yaitu: Pertama, faktor struktural. Faktor ini merupakan faktor penyebab kurangnya keterampilan pada kelompok muda dibandingkan dengan kelompok yang lebih matang dan faktor usia ketika lulus kuliah. Kedua, faktor penyebab non struktural yaitu adanya kenaikan upah buruh yang membuat perusahaan tidak menerima karyawan baru bahkan membuat perusahaan mem-PHK karyawannya. Intinya kecenderungan meningkatnya pengangguran terdidik sebagai akibat dari tingginya pendidikan seseorang maka semakin tinggi harapan seseorang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai (Mulyono, 1997)

Menurut Ritonga (2007) adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik adalah sebagai berikut :

1. Ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja), ketidakcocokan ini bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status, atau masalah keahlian khusus.
2. Terbatasnya daya serap tenaga kerja disektor formal (tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan yang kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relative kecil.
3. Belum efesiennya fungsi pasar kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Kemudian faktor gengsi juga menyebabkan lulusan akademi atau universitas memilih menganggur karena tidak sesuai dengan bidangnya.
4. Budaya malas juga sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia.

2.8. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini antara lain :

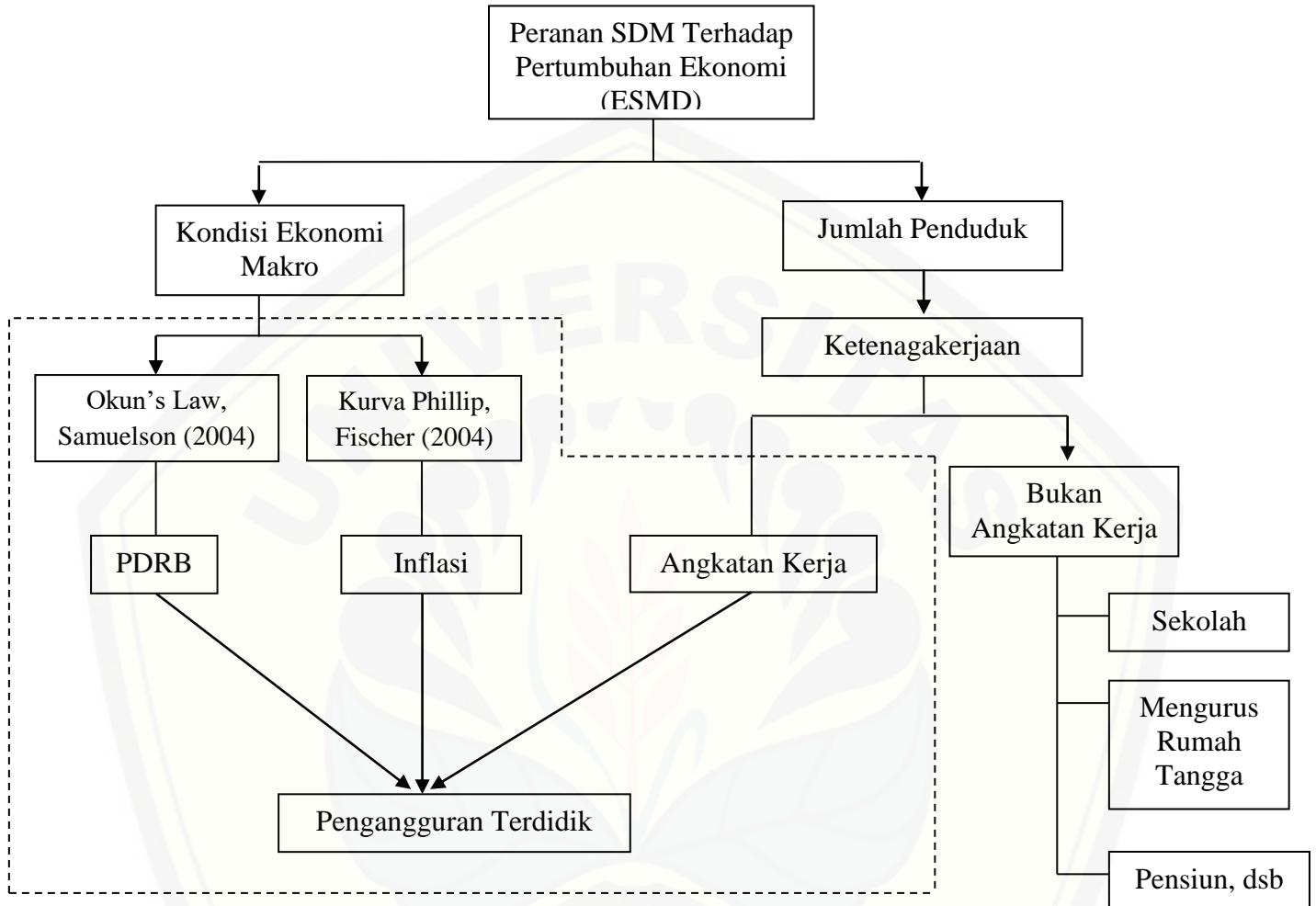
Tabel. 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul	Metode Analisa Data	Hasil
(Suswandi dkk., 2018)	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014	Regresi Liner Berganda	Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Tengah, variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Tengah dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran terbuka di Jawa Tengah
Shifa (2015)	Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Medan	Regresi Liner Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran.
(Khotimah, 2016)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Diy Tahun 2009-2015	Regresi Liner Berganda	Tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015

Nama (Tahun)	Judul	Metode Analisa Data	Hasil
(Rahmania dkk., 2019)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang	Regresi Berganda	Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara upah terhadap pengangguran terdidik Jumlah Penduduk usia produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Kota Padang
(Suhendra, 2016)	Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia	Regresi Liner Berganda	Tingkat pendidikan sarjana, upah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan tingkat pendidikan SMA (TPSMA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Pengangguran
(Mada, 2015)	Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik di Indonesia	Regresi Liner Berganda	pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi pengangguran terdidik, upah berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik, Untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik.

2.9. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

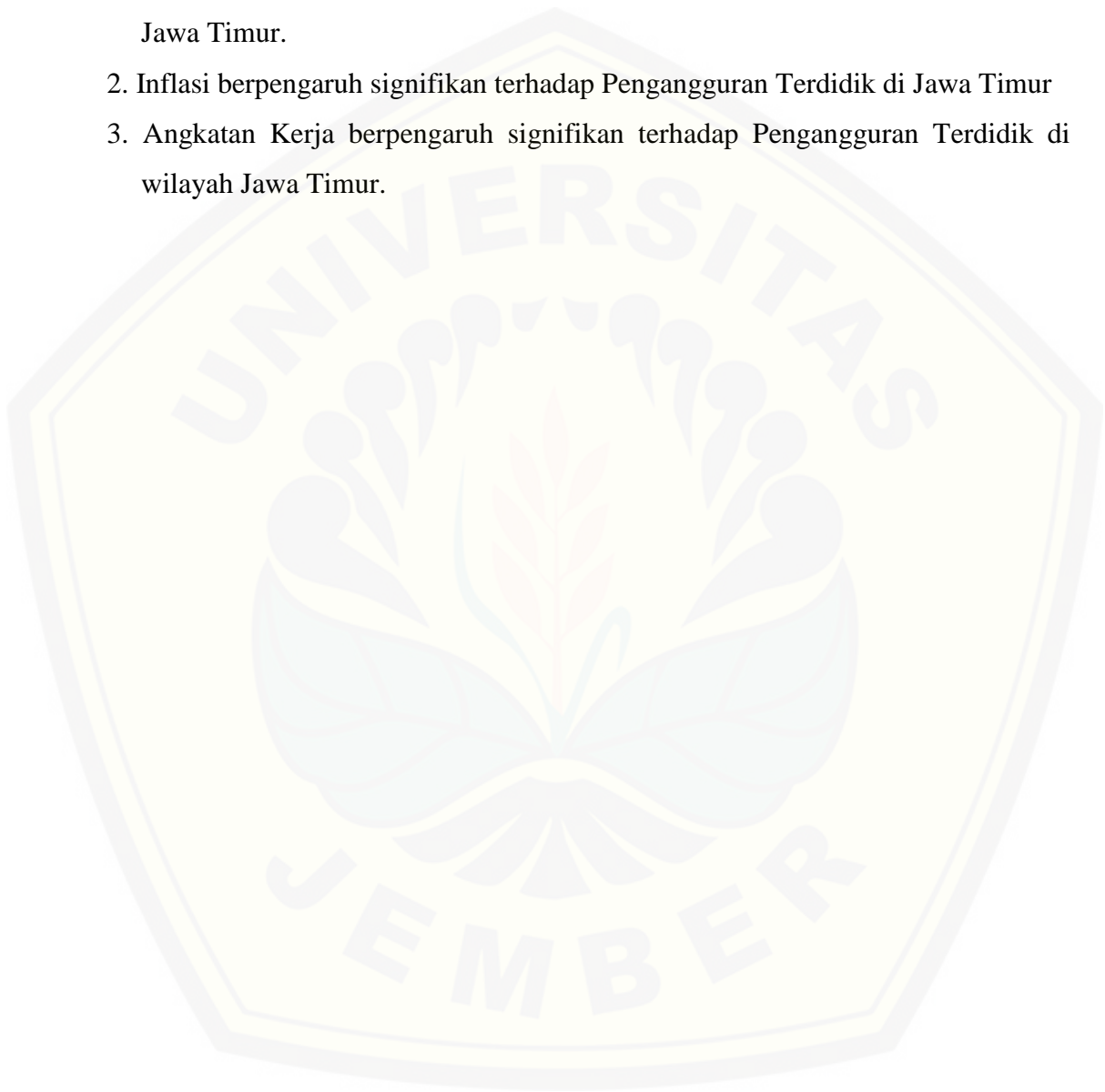
————— : Hubungan Lansung

----- : Ruang Lingkup Penelitian

2.10. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis atau dugaan sementara penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di wilayah Jawa Timur.
2. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur
3. Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di wilayah Jawa Timur.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *eksplanatory research*, merupakan jenis penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan untuk menguji kebenaran secara statistik (Dajan, 2000).

3.1.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pemilihan objek ini dilakukan berdasarkan keadaan kontribusi pembentuk tingkat pengangguran yang cenderung fluktuatif.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya. tersedia dan dapat diperoleh dari instansi yang terkait. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) berupa data PDRB, Angkatan Kerja, Inflasi dan Pengangguran Terdidik di Jawa Timur tahun 2012-2018.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Data Panel

Menurut Gujarati dalam (Mirza, 2012), analisis data panel merupakan suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan antar individu (*cross section*). Data *cross section* merupakan data yang diperoleh dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* merupakan data yang diperoleh sari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Dalam melakukan estimasi dengan model regresi panel data terdapat 3 pendekatan yang sering

digunakan, yaitu: metode *Pooled Ordinary Least Squared* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

1. *Pooled Ordinary Least Squared* (PLS)

Model *Pooled Ordinary Least Squared* suatu pendekatan yang sangat sederhana dalam mengelolah data panel dengan menggunakan metode kuadrat kecil. Metode ini dikenal juga sebagai *Common Effect Model* (CEM). Pada metode ini, model mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intersep dari masing-masing variabel adalah sama koefisien dari variabel-variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit cross section. Kelemahan dalam model PLS ini yaitu adanya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya, dimana kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain (Winarno, 2015).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan FEM menetapkan bahwa α adalah sebagai kelompok yang spesifik/berbeda dalam *constant term* pada model regresinya. Formulasi yang biasa dipakai dalam model mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit dapat dilihat dalam perbedaan *constant term*.

3. *Random Effect Model* (REM)

Dalam metode REM perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section* (Nachrowi dan Usman, 2006).

3.2.2 Model Regresi Data Panel

Model regresi dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel terikat yaitu Pengangguran Terdidik dan variabel bebas antara lain, PDRB, Angkatan Kerja, dan Inflasi. Apabila ditulis dalam suatu fungsi matematis, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Pengangguran Terdidik
 X1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 X2 = Inflasi
 X3 = Angkatan Kerja
 a = Konstanta
 b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi
 e = *Error*

3.2.3 Uji Statistik

Evaluasi model estimasi berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan melakukan beberapa pengujian yang antara lain sebagai berikut:

a. Uji F

Uji F ini adalah pengujian yang bertujuan mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji F mengikuti distribusi F dengan derajat bebas sebanyak (k-1) untuk numerator dan (n-k) untuk denominator, dimana k merupakan banyaknya parameter termasuk konstanta, sedangkan n adalah banyaknya observasi (Widarjono, 2007)

Nilai Prob (F-Statistik) dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / n - 1}$$

Keterangan:

- k = Jumlah variable yang diestimasi termasuk konstanta.
 N = Jumlah observasi.

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika F dihitung < F tabel maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, yang artinya variabel penjelasan secara bersamaan tidak mempengaruhi variable yang dijelaskan secara signifikan.

2. Jika $F_{hitung} > F_{table}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel penjelas secara bersamaan mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

b. Uji t-Statistik

Tujuan digunakannya model uji t dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel terikat (Y) terhadap variabel bebas (X).

$$t_{hitung} = \frac{b}{sb}$$

Keterangan:

b = Koefisien variabel bebas

Sb = Standart deviasi

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel telah ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

a) Hipotesis PDRB terhadap Pengangguran Terdidik

$H_0 = b_1 = 0$, berarti variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik

$H_1 = b_1 \neq 0$, berarti variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik

b) Hipotesis Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik

$H_0 = b_2 = 0$, berarti variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik

$H_1 = b_2 \neq 0$, berarti variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik

c) Hipotesis Angkatan Kerja terhadap Pengangguran Terdidik

$H_0 = b_3 = 0$, berarti variabel Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik

$H_1 = b_3 \neq 0$, berarti variabel Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terdidik

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b) Jika probabilitas t hitung $\geq \alpha$ (0.05), dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- c. Koefisien Determinasi (*R-square*)

Winarno (2015) menyatakan bahwa model yang sudah dianalisis, harus diuji kualitasnya dengan menghitung koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R_2 (*R-square*). Nilai R_2 selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R_2 , semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen.

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Winarno (2015) menyatakan bahwa salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Cara mengujinya dengan alat analisis dan Eviews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Sebenarnya normalitas data dapat dilihat dari gambar histogram, namun polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung.

- 1) Bila nilai Jarque-Bera tidak signifikan (lebih kecil dari 2) maka data berdistribusi normal.
- 2) Bila nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal (hipotesis nolnya adalah data berdistribusi normal).

b. Uji Multikolinearitas

Winarno (2015) menjelaskan mengenai multikolinearitas yaitu adanya hubungan linier antara variabel independen. Terjadinya multikolinearitas ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Nilai R-square (R^2) tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.
2. Menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas.
3. Melakukan regresi untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen yang secara bersama-sama mempengaruhi satu variabel independen yang lain.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah membiarkan saja model kita mengandung multikolinearitas karena estimatornya masih dapat bersifat BLUE, menambah data baru, menghilangkan salah satu variabel independen, terutama yang memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel lain dan transformasi salah satu (atau beberapa) variabel termasuk misalnya dengan melakukan diferensi.

c. Uji Auto Korelasi

Winarno (2015) menyatakan bahwa autokorelasi adalah hubungan antara residual atau observasi dengan residual observasi lainnya. Data yang mengandung autokorelasi maka estimator yang didapatkan masih linier, tidak bias tetapi tidak mempunyai varian yang minimum (*no longer best*). Dengan demikian, seperti halnya pengaruh heteroskedastisitas, autokorelasi juga akan menyebabkan estimator hanya bersifat LUE, tidak lagi BLUE. Salah satu cara memeriksa ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson (DW).

d. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dasar dari metode regresi linier adalah varians tiap unsur *error* adalah suatu angka konstan yang sama atau homogen. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians tiap unsur *error* tidak konstan. Winarno (2015) menyatakan bahwa heteroskedastisitas dapat menyebabkan:

1. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (tidak lagi BEST), sehingga hanya memenuhi karakteristik LUE (Linear Unbiased Estimator). Meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linier dan tidak bias.
2. Perhitungan *standard error* tidak dapat lagi dipercaya kebenarannya karena varian tidak minimum. Varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien.
3. Uji hipotesis yang didasarkan pada uji t dan uji F tidak dapat lagi dipercaya, karena *standard error*-nya tidak dapat dipercaya.

Salah satu teknik pendugaan yang cocok jika terjadi heteroskedastisitas jika ragam sisaan diketahui adalah menggunakan metode kuadrat terkecil terboboti (WLS, *weighted least squares*) yang merupakan kasus khusus dari teknik ekonometrika yang lebih umum, yang disebut dengan GLS (*generalized least squares*).

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian. Pengertian penelitian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengangguran Terdidik (Y) merupakan rasio antara jumlah pencari kerja yang berpendidikan pada tingkat SLTA keatas terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Pengangguran Terdidik dalam penelitian ini merupakan jumlah Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dinyatakan dalam satuan jiwa sesuai dengan data yang diakses dari BPS Jawa Timur.
2. PDRB (X1) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dalam penelitian ini merupakan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dinyatakan dalam Milyar Rupiah.

3. Inflasi (X2), merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Laju inflasi tersebut dihitung berdasarkan angka indeks yang disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Inflasi dalam penelitian ini merupakan Inflasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur dinyatakan dalam prosentase (%) sesuai dengan data yang diakses dari BPS Jawa Timur.
4. Angkatan Kerja (X3) merupakan Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab. Angkatan Kerja dalam penelitian ini merupakan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dinyatakan dalam satuan jiwa.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur, maka untuk mengatasi Pengangguran dapat dilakukan dengan meningkatkan PDRB Jawa Timur.
2. Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur, artinya semakin tinggi Inflasi maka Pengangguran Terdidik semakin rendah. Sebaliknya semakin rendah Inflasi maka Pengangguran Terdidik semakin tinggi.
3. Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur. Jumlah Angkatan Kerja tidak memberikan kontribusi pada perubahan Pengangguran Terdidik di Jawa Timur.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka untuk menekan angka Pengangguran Terdidik di Jawa Timur dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah diharapkan :
 - a. Meningkatkan PDRB di Jawa Timur, hal ini dapat dilakukan dengan stimulus atau rangsangan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat desa maupun kota.
 - b. Mampu mengendalikan laju inflasi, sehingga penataan angkatan kerja dapat berjalan optimal dan dapat mengurangi jumlah Pengangguran Terdidik di Jawa Timur.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih luas misalnya seluruh kabupaten di Indonesia serta periode yang lebih panjang agar hasil yang diperoleh lebih representatif serta

menggunakan atau menambah variabel lain seperti Tingkat Pendidikan, Investasi dan Upah Minimum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A. 1990. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI.
- Andriyani, D. 2012. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Aceh: Universitas MALIKUSSALEH.
- Arsyad, L. 2014. Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*. 05(01):1–37.
- Badan Pusat Statistik, B. 2009. *PDRB*. Jakarta: BPS.
- BI. 2019. *Inflasi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BPS. 2019. *PDRB Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jatim.
- Darwin, M. 2016. Review buku “ekonomi sumber daya manusia”. *Populasi*
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khotimah. 2016. Pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di diy tahun 2009-2015
- Kusnendi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PPUT.
- Mada. 2015. Analisis variabel yang mempengaruhi jumlah pengangguran terdidik di indonesia
- Mankiw, N. G. 2007. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Muslim, I., E. F. Harahap, dan Kholissurahman. 2019. ANALISIS faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di sumatera barat
- Rahmania, M., E. tria Wulandari, dan W. Purnama sari. 2019. Analisis faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di kota padang. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*. 1(2):114.
- Rees, J. 1990. *Natural Resources: Allocation, Economics and Policy*. London: Routledge.
- Ritonga, A. 2007. *Statistika Terapan Untuk Penelitian*. Jakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia.

Samuelson, A. Paul, Nordhaus, dan D. William. 2001. *Ilmi Makro Ekonomi*. Edisi PT. Media. Jakarta.

Subri, M. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Suhendra. 2016. Tingkat pendidikan, upah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di indonesia

Sukirno, S. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Edisi Rajawali P. Jakarta.

Suswandi, P. E., Y. T. Kasanah, dan A. Hanim. 2018. Faktor - faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di provinsi jawa tengah tahun 2009-2014. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. 5(1):21.

Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.

Worldmeters. 2019. WORLD POPULATION SECTIONS. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> [Diakses pada July 28, 2019].



LAMPIRAN

Lampiran 1. Entri Data Penelitian

No	Kab/Kota	Tahun	PDRB (milyar)	Inflasi (%)	Angkatan Kerja	Pengangguran Terdidik
			X1	X2	X3	Y
1	Jember	2012	41327.1	2,43	1149629	53445
2	Jember	2013	45055.5	4,49	1169366	2556
3	Jember	2014	50602.1	7,21	1157462	6794
4	Jember	2015	56377.37	7,52	1173139	17227
5	Jember	2016	62513.68	1,93	1173139	17227
6	Jember	2017	65708.12905	0,66	1281242	10445
7	Jember	2018	69144.6642	1,97	1276672	9458
8	Sumenep	2012	20079.7	4,18	637160	18488
9	Sumenep	2013	25360	5,05	629431	2067
10	Sumenep	2014	28311.4	6,62	622460	1720
11	Sumenep	2015	27156.11	8,04	593143	4688
12	Sumenep	2016	28971.14	2,19	593143	4688
13	Sumenep	2017	29799.7146	0,43	629884	3684
14	Sumenep	2018	30932.10376	1,73	619659	3282
15	Kediri	2012	72303	3,62	141428	73133
16	Kediri	2013	79858.9	4,63	136546	5992
17	Kediri	2014	87704.2	8,05	145426	6260
18	Kediri	2015	95865.24	7,49	142628	8811
19	Kediri	2016	106396.45	1,3	142628	8811
20	Kediri	2017	111609.8761	0,43	144688	2168
21	Kediri	2018	117279.6578	0,9	145556	7029
22	Malang	2012	38747	4,05	419899	102486
23	Malang	2013	42819.9	4,6	435058	12978
24	Malang	2014	46563.2	7,92	423631	14144
25	Malang	2015	51824.39	8,14	406935	17408
26	Malang	2016	57170.6	2,62	406935	17408
27	Malang	2017	60423.60714	0,49	443035	7411
28	Malang	2018	63879.83747	1,95	454849	4086
29	Probolinggo	2012	18796.8	3,78	636680	27276
30	Probolinggo	2013	20830.9	5,58	618642	3385
31	Probolinggo	2014	23158	7,98	601353	1930
32	Probolinggo	2015	25688.56	6,79	601681	3084
33	Probolinggo	2016	28069.42	1,53	601681	3084
34	Probolinggo	2017	29719.9019	0,69	590934	2524
35	Probolinggo	2018	31497.15203	1,22	612763	3440

No	Kab/Kota	Tahun	PDRB (milyar)	Inflasi (%)	Angkatan Kerja	Pengangguran Terdidik
			X1	X2	X3	Y
36	Madiun	2012	10182	3,49	364358	39534
37	Madiun	2013	11293.6	3,51	366133	1919
38	Madiun	2014	12532.1	7,52	362786	1254
39	Madiun	2015	13901.45	7,4	351752	4598
40	Madiun	2016	15226.95	2,25	351752	4598
41	Madiun	2017	16129.90814	0,47	349665	2017
42	Madiun	2018	17091.25066	2,05	376948	6347
43	Surabaya	2012	293180.8	4,72	1437448	259789
44	Surabaya	2013	327802	4,39	1483343	20621
45	Surabaya	2014	365350.9	7,52	1465502	24144
46	Surabaya	2015	406231.68	7,9	1468094	28247
47	Surabaya	2016	451383.24	3,22	1468094	28247
48	Surabaya	2017	479053.0326	0,85	1495837	28041
49	Surabaya	2018	508754.3206	1,84	1520041	27165

Lampiran 2. Uji Statistik**Statistik Deskriptif**

Variabel	Maksimum	Minimum	Std.Deviasi
PDRB	508,754.32	10,182.00	132,944.36
Inflasi	8.14	0.43	2.66
Angkatan Kerja	1,520,041	136,546	446,917.22
Pengangguran Terdidik	259,789	1,254	39,885.42

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.090626	(6,39)	0.0001
Cross-section Chi-square	32.396370	6	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/18/20 Time: 03:03

Sample: 2012 2018

Periods included: 7

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.546996	2.816205	0.194232	0.8469
X1	0.542444	0.151771	3.574108	0.0009
X2	0.018335	0.056544	0.324272	0.7472
X3	0.193718	0.216493	0.894804	0.3757

R-squared	0.279606	Mean dependent var	9.064634
Adjusted R-squared	0.231580	S.D. dependent var	1.185737
S.E. of regression	1.039412	Akaike info criterion	2.993295
Sum squared resid	48.61698	Schwarz criterion	3.147729
Log likelihood	-69.33573	Hannan-Quinn criter.	3.051887
F-statistic	5.821942	Durbin-Watson stat	1.391108
Prob(F-statistic)	0.001890		

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.268000	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-3.414500	0.419118	0.543202	0.0000
X2	-0.113230	0.013350	0.000672	0.0000
X3	-1.802316	0.242648	17.232923	0.6223

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/18/20 Time: 03:07
 Sample: 2012 2018
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.37282	54.86028	1.282764	0.2071
X1	-3.414500	0.757881	-4.505322	0.0001
X2	-0.113230	0.050964	-2.221765	0.0322
X3	-1.802316	4.159100	-0.433343	0.6672

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.628092	Mean dependent var	9.064634
Adjusted R-squared	0.542267	S.D. dependent var	1.185737
S.E. of regression	0.802222	Akaike info criterion	2.577043
Sum squared resid	25.09886	Schwarz criterion	2.963128
Log likelihood	-53.13754	Hannan-Quinn criter.	2.723523
F-statistic	7.318279	Durbin-Watson stat	2.261720
Prob(F-statistic)	0.000004		

Uji Regresi Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/19/20 Time: 12:03

Sample: 1 7

Included observations: 7

Cross-sections included: 7

Total pool (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.37282	54.86028	1.282764	0.2071
X1	-3.414500	0.757881	-4.505322	0.0001
X2	-0.113230	0.050964	-2.221765	0.0322
X3	-1.802316	4.159100	-0.433343	0.6672

Fixed Effects (Cross)

JEMBER--C	1.892318
KEDIRI--C	-0.385515
MADIUN--C	-6.034662
MALANG--C	0.095762
PROBOLINGGO--C	-3.063494
SUMENEP--C	-2.741513
SURABAYA--C	10.23711

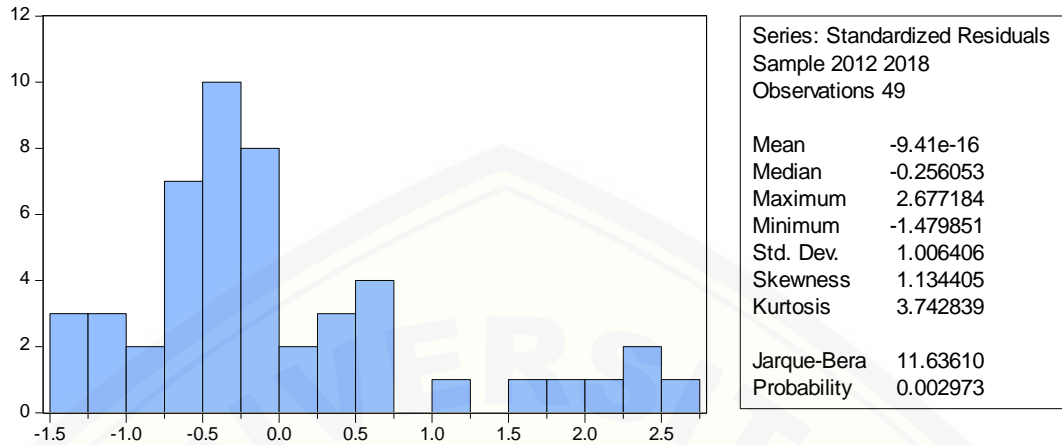
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.628092	Mean dependent var	9.064634
Adjusted R-squared	0.542267	S.D. dependent var	1.185737
S.E. of regression	0.802222	Akaike info criterion	2.577043
Sum squared resid	25.09886	Schwarz criterion	2.963128
Log likelihood	-53.13754	Hannan-Quinn criter.	2.723523
F-statistic	7.318279	Durbin-Watson stat	2.261720
Prob(F-statistic)	0.000004		

Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/19/20 Time: 12:03
 Sample: 1 7
 Included observations: 7
 Cross-sections included: 7
 Total pool (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.37282	54.86028	1.282764	0.2071
X1	-3.414500	0.757881	-4.505322	0.0001
X2	-0.113230	0.050964	-2.221765	0.0322
X3	-1.802316	4.159100	-0.433343	0.6672

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.628092	Mean dependent var	9.064634
Adjusted R-squared	0.542267	S.D. dependent var	1.185737
S.E. of regression	0.802222	Akaike info criterion	2.577043
Sum squared resid	25.09886	Schwarz criterion	2.963128
Log likelihood	-53.13754	Hannan-Quinn criter.	2.723523
F-statistic	7.318279	Durbin-Watson stat	2.261720
Prob(F-statistic)	0.000004		

Uji Multikolonieritas

Korelasi	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.033692	0.319723
X2	-0.033692	1.000000	0.022137
X3	0.319723	0.022137	1.000000

Uji Heteroskedastisitas (SPSS)